

RI Setop Ekspor Bauksit Juni 2023, Jokowi: Tiongkok apakah akan Gugat?

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah bakal menyatop ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023. Sebelumnya, pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020.

Kepala Negara mengungkapkan, sejauh ini 90 persen bijih bauksit diekspor ke Tiongkok. Ia pun mengaku tidak tahu langkah yang akan diambil pemerintah Tiongkok, setelah Indonesia menyatop ekspor bauksit.

"Kita akan setop lagi bulan Juni bauksit, setop. Padahal hati-hati, 90 persen ekspor barang mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu dia (Tiongkok) nanti gugat kita (atau) enggak," kata Jokowi dalam Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2).

Diketahui, Tiongkok berpotensi menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Hal ini berkaca pada kasus penyetopan ekspor bijih nikel di mana Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. "Kalau digugat, berarti nikelnya digugat oleh Eropa, bauksitnya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke

sana," tutur Jokowi.

Kendati ada potensi digugat, Jokowi meminta para menteri jangan mundur. Sebab, ada dampak yang begitu besar dari penyetopan ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, hingga emas.

Saat pemerintah menyatop ekspor nikel, nilai ekspor Indonesia naik menjadi Rp 450 triliun dari sekitar Rp 17 triliun.

"Banyak yang bertanya kepada saya. 'Pak, ini disetop yang dapat perusahaan-perusahaan gede'. Jangan keliru, nikel itu waktu kita setop ekspor kita di Rp 17 triliun, setelah sekarang jadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka Rp 450 triliun," tutur Jokowi.

Dari nilai ekspor yang besar tersebut, pemerintah mendapat tambahan penghasilan negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah pun mendapat dividen atau royalti jika menjadi pemegang saham di perusahaan tambang tersebut. Penghasilan negara yang besar itu lantas disalurkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa hingga menganggarkan bantuan sosial (bansos). ● han

Kejaksan Tangani Kasus dengan Nilai Kerugian Tertinggi di 2022

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan tahunan hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada 2022 yang ditangani oleh 3 aparat penegak hukum (APH), yakni kejaksaan, kepolisian, dan KPK.

ICW menyoroti kinerja masing-masing APH dalam menindak kasus korupsi di tahun lalu dengan total kerugian negara sebesar Rp 42,747 triliun.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW Lalola Easter memaparkan temuan umum terkait penindakan tipikor pada 2022 mencapai 597 kasus. Kasus korupsi itu meliputi kasus suap, pungutan liar, dan pencucian uang.

"Temuan umum yang terjadi pada 2022 yaitu 597 kasus, 1.396 orang, kerugian negara Rp 42,747 triliun. Kasus suap sebesar Rp 693 miliar, pungutan liar Rp 11,9 miliar, pencucian uang Rp 955 miliar," kata Lalola.

Lalola pun memaparkan kinerja masing-masing APH dalam menangani kasus korupsi di tahun 2022. Dari ketiga APH, Kejaksaan menjadi institusi yang menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian negara

terbesar, yakni mencapai Rp 39,207 triliun.

"Kejaksan 405 kasus, 909 tersangka, nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani Rp 39,207 triliun," papar Lalola.

Sedangkan kepolisian berhasil menangani korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara KPK dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 2,2 triliun.

"Kepolisian 138 kasus, 307 tersangka, Rp 1,327 triliun. KPK 36 kasus, 150 tersangka, Rp2,212 triliun," paparnya.

Lalola juga menyampaikan tren kinerja dari ketiga APH dalam menangani korupsi di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

"Kejaksan, di tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 371, tersangka sebanyak 814. Di tahun 2022 ada 405 kasus, 909 tersangka. Lalu kepolisian, di tahun 2021, jumlah kasus 130, tersangka sebanyak 244. Di tahun 2022 jumlah kasus 138, tersangka 337," kata Lalola.

"KPK, di tahun 2021, jumlah kasus sebanyak 32, tersangka 115. Di tahun 2022 jumlah kasus 36, tersangka sebanyak 150," katanya. ● mei

PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik, Semua Tunduk Hukum

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menegaskan, pihaknya menolak adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan alasan politik. Semua warga setara di hadapan hukum, baik berstatus presiden maupun tukang tambal ban.

Hal tersebut disampaikan Segaf dalam sambutannya di acara Apel Siaga PKS 2023 di Stadion Madya GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/2).

Awalnya, Segaf mengatakan, Indonesia telah membuktikan tidak terpecah belah karena sudi, agama, dan status sosial.

"Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, agama, dan status sosial bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan, kemajuan itu sebagai modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa," ujar Segaf.

Kemudian, Segaf menyinggung perihal kriminalisasi dengan alasan politik. Ia menekankan bahwa semua warga ha-

rus tunduk dan patuh terhadap hukum, tanpa memandang jabatan.

"Menolak kriminalisasi dengan alasan politik. Karena penegakan hukum dilakukan untuk menunjukkan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral, atau bharada, semua harus tunduk," katanya.

Segaf berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bisa bekerja secara profesional. Ia lantas mengingatkan, jika ada suara rakyat yang diselewengkan, maka pasti diketahui Tuhan. "Takut lah kepada Allah SWT yang maha melihat, suara rakyat yang diselewengkan akan merusak tatanan bangsa dan negara," ujar Segaf.

Segaf menegaskan bahwa PKS juga menolak praktik politik uang di Pemilu 2024. Politik yang seharusnya diganti dengan model politik lain demi kepentingan masyarakat Indonesia. ● mei

Polhukam

FOTO: ANTARA



Pakar Dorong Agar Delik Kekayaan Tak Wajar Masuk dalam UU Tipikor

LHKPN para pejabat tak bertaji terhadap pencegahan Korupsi. LHKPN hanya sebatas rutinitas pelaporan karena tidak ada sanksi bagi yang tidak lapor.

JAKARTA (IM) - Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan delik tentang kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*) dan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori pidana.

Jika unsur kekayaan yang tidak wajar masuk ke dalam beleid itu, maka kasus penyelenggara negara dengan harta fantastis seperti pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, bisa langsung disidiki.

"Kita dorong Indonesia, pemerintah dan DPR, segera merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segera masukkan *illicit enrichment* dan *trading in influence* untuk menjadi bagian dari undang-undang," kata Yenti saat di-

hubungi wartawan, Sabtu (26/2).

Menurut Yenti, Indonesia sudah harus memasukkan kekayaan yang tidak wajar dan memperdagangkan pengaruh sebagai bagian dari tindak pidana korupsi karena sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC).

Jika delik kekayaan yang tidak wajar dimasukkan ke dalam UU Pemberantasan Tipikor maka akan memudahkan penyidik mengusut harta tak wajar para pejabat.

"Kalau ada kejanggalan transaksi atau harta yang tidak wajar langsung ada pembuktian terbalik. Benar enggak ini hartanya dari sumber yang sah atau justru hasil kejahatan," ujar Yenti.

Delik kekayaan yang tidak wajar dan memperdagangkan pengaruh seharusnya menjadi bagian dari paket aturan hukum tentang pemberantasan korupsi selain UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU Perampasan Aset serta

RUU Pembatasan Uang Kartal.

Yenti sepakat LHKPN para pejabat tidak bertaji dalam hal pencegahan dan sebatas rutinitas pelaporan karena tidak ada sanksi bagi yang tidak melaporkan.

"Pemberatan sanksi juga sudah lama disuarakan tapi tidak pernah terwujud dalam undang-undang. Revisi undang-undang itu enggak usah semuanya. Tinggal disisipkan saja supaya tidak makan waktu. Kan mudah," ucap Yenti.

Jumlah harta kekayaan Rafael yang fenomenal terungkap setelah sang anak, Mario Dandy Satrio, terlibat kasus penganiayaan terhadap David Latumahina. David merupakan anak dari Jonathan Latumahina yang merupakan pengurus GP Ansor.

Setelah Mario ditangkap beserta sebuah mobil Jeep Rubicon yang digunakan buat mengangkut pelaku, beredar rekaman video yang memperlihatkan peristiwa penganiayaan terhadap David. Kemudian sejumlah harta kekayaan Rafael yang diduga janggal terungkap.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhu-

kam) Mahfud MD, memaparkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012.

"Laporan kekayaan yang bersangkutan sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012, tentang transaksi keuangannya yang agak aneh, tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti," ungkap Mahfud kepada wartawan di kawasan Slipi, Jakarta, Jumat (24/2).

RAKORNAS PAN 2023

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkiffi Hasan (kanan) melambaikan tangan ke arah peserta rakornas sesuai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2). Rakornas PAN 2023 yang digelar 26-27 Februari itu dihadiri sekitar 2.400 peserta beragendakan sejumlah lokakarya (*workshop*) politik serta konsolidasi persiapan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 serta rencana dukungan kepada sejumlah kandidat bakal Capres dan Cawapres yang diusung PAN pada Pilpres 2024.

Soal Capres PDIP, Megawati Minta Petunjuk Allah SWT dan Membicarakan dengan Jokowi

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan (PDIP), Hastu Kristiyanto mengatakan, jika nanti partainya sudah mengumumkan calon presiden (*capres*), itu merupakan hasil dari doa dan kontemplasi Megawati Soekarnoputri kepada Allah SWT, serta hasil komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita percaya untuk calon presiden di partai, diajarkan ada rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, nanti akan ada juga sinyal dan Ibu Megawati, beliau sosok yang sebelum mau tidur, beliau melakukan doa, memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, berkontemplasi," kata Hastu menjawab wartawan tentang sosok capres yang akan diumumkan PDIP, di Ponorogo, Minggu (26/2).

"Lalu Ibu Mega berdialog dengan Pak Jokowi untuk melihat bagaimana problematika bangsa, bagaimana kepemimpinan ke depan, bagaimana tanggungjawabnya. Setelah kesemuanya dipersiapkan, pada momentum yang tepat, Ibu Megawati akan mengumumkan. Jadi mohon bersabar," katanya.

Lebih lanjut Hastu menjelaskan, jika seorang pemimpin itu berat. Sehingga, partainya akan mencari pemimpin yang tidak hanya mengandalkan pencitraan.

"Yang kita cari adalah pemimpin yang digembleng lahir dan batin, yang rekam jejaknya baik, dan itu lahir dari PDIP Perjuangan," kata Hastu.

Hastu menekankan, PDIP juga akan mendorong kader partai untuk jadi capres pada Pilpres mendatang. Sebab, kata Hastu, partai akan mengedepankan calon internal.

"Karena tujuan kita berpartai untuk mendorong kader partai ditempatkan pada jabatan penting dan strategis setelah dipersiapkan dengan sekolah partai dan penugasan kader kader partai," kata Hastu.

"Kalau PDIP Perjuangan, calonnya dari internal. Kalau partai lain yang sudah mencalonkan, maka kita ada perbedaan. Dan perbedaan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tak perlu dipertentangkan. Biar rakyat yang menjadi hakim. Biar rakyat yang menentukan pilihannya siapa pemimpin terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan pak Jokowi. Bagi PDIP Perjuangan, sejak Bung Karno, Bu Mega, pak Jokowi, dan the next president itu adalah satu kesatuan komitmen bagi masa depan Indonesia raya kita," ujarnya. ● han



APEL SIAGA PEMENANGAN PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikh (kiri) bersama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kedua kanan), Sekjen Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan bakal calon presiden yang diusung PKS Anies Baswedan (kedua kiri) melakukan cek kesiapan pasukan saat Apel Siaga Pemenangan PKS Tahun 2024 di Stadion Madya Kompleks GBK, Jakarta, Minggu (26/2). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar apel siaga kemenangan untuk Pemilu 2024 yang merupakan rangkaian Rakernas PKS 2023.

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pembubaran PT PUTERA ABADI KARYA (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 23 November 2021 No. 22, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Bogor, 27 Februari 2023
Likuidator
PT PUTERA ABADI KARYA (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan pembubaran PT Prudential Town House Development (dalam likuidasi) ["Perseroan"] berdasarkan akta tanggal 9 November 2021 No. 12, dibuat dihadapan MYRA YUWONO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka. Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 27 Februari 2023
Likuidator
PT Prudential Town House Development (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat di Kompensasikan Sebagai Setoran Saham, dengan ini diumumkan bahwa telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara konversi utang dalam PT ESSAM TIMBER, berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Nomor 16, tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dihadapan RITA KOMALA DEWI, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terhadap pemegang saham saat ini ("Perseroan")
Jakarta, 27 Februari 2023
Direksi
PT ESSAM TIMBER

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT NIAGA MANAJEMEN CITRA ("Perseroan")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Meeting Foodbank Griya CIMB Niaga Jalan Wahid Hasyim Blok B 4 No.3, Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang Selatan, Banten.
A. Agenda RUPS Tahunan :
1. a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola Perusahaan tahun buku 2022;
c. Persetujuan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik tahun 2023;
4. Penetapan honorarium Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
B. Agenda RUPS Luar Biasa
1. Persetujuan Pelepasan seluruh saham milik Koperasi Karyawan Citra Niaga (KKCN) dalam Perseroan
2. Persetujuan untuk Koperasi Karyawan Niaga Manajemen Citra (KKNMC) mengambil seluruh bagian atas pelepasan saham milik KKN dalam Perseroan.
3. Persetujuan mengubah Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan.
Adapun Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 telah tersedia di kantor Perseroan. Untuk selanjutnya kami mohon konfirmasi Bapak/Ibu bila ada koreksi dan/atau penambahan materi RUPS Tahunan diatas, Kami harapkan konfirmasi tersebut sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 06 Maret 2023.
Demikian kami sampaikan, tanggapan Bapak/Ibu atas rencana pelaksanaan RUPS ini sangat kami harapkan.
Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 27 Februari 2023
PT Niaga Manajemen Citra
Direksi